



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN LAYANAN DIGITAL DAN KEAMANAN SIBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO PONCO WINDARTI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 260889

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.089.407.376**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/170 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 559.234.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 914.100.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.359.945.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.588.582.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/58 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 661.553.376
6. Tanah Seluas 111 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.005.993.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.550.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI IONIC 5 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI PALISADE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **445.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **130.630.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **4.915.277.787**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. 750.000.000

Rp. 15.880.315.163

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 15.880.315.163

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.